



HOLDING UMKM: MANFAAT DAN TANTANGANNYA

Dian Cahyaningrum*

Abstrak

Pemerintah berencana membentuk holding UMKM. Tulisan ini mengkaji holding UMKM dan manfaatnya, tantangan dan upaya mengatasinya. Holding UMKM merupakan konsep pengelompokan UMKM dalam entitas yang terkoordinasi. Tujuannya mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, dan memperkuat rantai pasok industri. Manfaat holding UMKM antara lain menjamin keberlanjutan produksi, kepastian pasar, menekan biaya produksi, serta meningkatkan daya saing dan pendapatan UMKM. Tantangan pembentukan holding UMKM antara lain ketiadaan regulasi, kebutuhan permodalan, dan kualitas produk. Pelaku UMKM juga banyak yang belum memiliki kemampuan manajerial, pemahaman tentang pembukuan, akses ke perbankan, dan pemanfaatan teknologi digital. Untuk itu, pemerintah perlu segera membentuk PP holding UMKM dan BLU pembiayaan. Sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan fasilitasi terhadap UMKM juga perlu dilakukan. Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah segera membentuk PP holding UMKM dan BLU pembiayaan, serta melakukan upaya mengatasi tantangan. Komisi VII DPR RI juga perlu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembentukan holding UMKM dan BLU pembiayaan.

Pendahuluan

Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Maman Abdurrahman, berencana membentuk *holding* Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memberdayakan dan menumbuhkembangkan UMKM. Gagasan tersebut terinspirasi dari negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang berhasil mengembangkan UMKM melalui pembentukan *holding* (“Pembentukan Holding UMKM”, 2025). Sebagai langkah awal, Kementerian UMKM melakukan *kick-off* program *holding* UMKM sektor kelautan dan perikanan, dengan melepas ekspor produk perikanan tangkap pada 28 Mei 2025 ke kota Fuzhou, Fujian, China senilai kurang lebih US\$75.000 (Anggela, 2025).

Rencana pembentukan *holding* UMKM mendapat sambutan baik dari berbagai pihak. Anggota Komisi VII DPR RI, Beniyanto, menilainya sebagai gagasan tepat untuk memperkuat UMKM (Zhafira, 2025). Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga mendukungnya, Bank Himbara akan menyediakan pembiayaan dan beberapa BUMN sektor manufaktur dapat berperan menjadi “payung” yang mengoordinasikan ribuan UMKM dalam *holding* UMKM (Baderi, 2025). Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) juga mendukung

*) Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email: dian.cahyaningrum@dpr.go.id

rencana pembentukan *holding* UMKM yang diharapkan membawa dampak positif bagi perkembangan UMKM ke depannya (Anggraeni, 2025). Begitu pula Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) juga mendukung rencana pembentukan *holding* UMKM karena dapat mempermudah UMKM mendapatkan investasi langsung (Simanjuntak, 2024).

Holding UMKM diharapkan mempercepat industrialisasi dan mendatangkan manfaat bagi UMKM. Namun, tidak mudah membentuk *holding* tersebut karena ada beberapa tantangan seperti kesiapan regulasi, dan bentuk kelembagaan serta tata kelolanya yang perlu diupayakan solusinya. Untuk itu, tulisan ini mengkaji *holding* UMKM dan manfaatnya, tantangan pembentukan *holding* UMKM dan upaya mengatasinya.

***Holding* UMKM dan Manfaatnya**

UMKM tersebar di berbagai sektor, seperti manufaktur, pertanian, kuliner, fesyen, dan sebagainya. Ada 10 sektor strategis yang memiliki dampak ekonomi cukup besar bagi masyarakat, yang rencananya akan dibentuk *holding* UMKM. Selain sektor kelautan dan perikanan, sektor strategis lainnya yang akan dibentuk *holding* UMKM adalah sektor pariwisata (8,74 juta UMKM); kuliner (4,8 juta UMKM); kerajinan tangan (672,14 ribu UMKM); makan bergizi gratis (82,25 ribu UMKM); kesehatan dan kecantikan (81,97 ribu UMKM); perumahan rakyat (32,29 ribu UMKM); pertambangan dan energi terbarukan (107,02 ribu UMKM); *supply chain* otomotif (9,85 ribu UMKM); dan industri olah raga (2,88 ribu UMKM) (Betalia, 2025).

Secara umum, konsep *holding* merujuk pada perusahaan induk (*holding company*) yang memiliki kendali atas perusahaan-perusahaan lain (*subsidiary company*) melalui kepemilikan saham mayoritas. Dalam konteks UMKM, konsep *holding* tersebut dimodifikasi. Menurut Maman Abdurrahman, *holding* UMKM adalah konsep pengelompokan beberapa UMKM ke dalam satu wadah atau entitas yang terkoordinasi untuk meningkatkan efisiensi, daya saing, akses terhadap pembiayaan, pasar, dan teknologi (“Menteri Sebut UMKM Holding”, 2025).

Holding UMKM bertujuan mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, serta memperkuat rantai pasok industri secara lebih efisien dan produktif (“Pembentukan Holding UMKM”, 2025). Terhubungnya UMKM dengan industri yang lebih besar dalam suatu rantai pasok (*supply chain*) sangat penting karena jumlah UMKM yang masuk ke dalam rantai pasok dengan industri besar masih sangat rendah. Sebagaimana dikemukakan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Shinta Kamdani, dari total 66 juta UMKM di Indonesia hanya 7% pelaku UMKM yang berhasil masuk ke dalam rantai pasok domestik (“Pemerintah Akan Tunjuk”, 2025). Bahkan tingkat rantai pasok global UMKM Indonesia masih sangat rendah, jauh lebih rendah dibandingkan Vietnam. Berdasarkan data Asian Development Bank Institute, rantai pasok global Indonesia berada di level 4,1% pada tahun 2023, sedangkan Vietnam ada di level 20% (“Pemerintah Akan Tunjuk”, 2025).

Holding UMKM diharapkan mendatangkan manfaat bagi UMKM, antara lain menjamin keberlanjutan produksi karena ada kepastian permintaan dari usaha besar mitra UMKM. Manfaat lainnya, ada kepastian pasar (*off-taker*) karena produk UMKM akan dibeli usaha besar mitranya sehingga mengurangi beban pemasaran UMKM. Kepastian pasar tersebut penting terutama bagi sektor-sektor UMKM yang hasil produksinya cepat rusak jika tidak cepat ditangani, misalnya sektor perikanan. *Holding* UMKM juga akan menekan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan daya saing UMKM karena ada efisiensi pengadaan bahan baku, produksi, dan distribusi. Peningkatan daya saing akan meningkatkan kapasitas produksi dan pendapatan UMKM. Berbagai manfaat *holding* UMKM tersebut akan menguatkan UMKM sehingga UMKM dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Tantangan Pembentukan *Holding* UMKM dan Upaya untuk Mengatasinya

Tantangan utama *holding* UMKM adalah belum ada regulasi khusus yang mengatur *holding* UMKM seperti bentuk hukum, struktur *holding*, tata kelola, mekanisme operasionalnya, dan sebagainya. Saat ini baru ada aturan tentang kemitraan UMKM, yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU UMKM) beserta perubahannya yaitu UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU No. 6 Tahun 2023). Sebagai aturan pelaksana kemitraan, telah dibentuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Ketiadaan regulasi khusus tentang *holding* UMKM menyebabkan ketidakjelasan dalam pembentukan dan pelaksanaan *holding* UMKM. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera menyelesaikan pembentukan PP *holding* UMKM (“Bentuk Holding UMKM”, 2024).

Tantangan lainnya terkait permodalan. *Holding* UMKM membutuhkan modal awal untuk membentuk badan hukum *holding*, pengadaan sarana produksi, penguatan modal kerja, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan modal tersebut, pemerintah berencana membentuk lembaga pembiayaan khusus yang dirancang untuk mempermudah akses UMKM terhadap pendanaan yang lebih terjangkau dan efisien. Salah satu opsi yang dikaji adalah pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) pembiayaan pemerintah (“Pembentukan Holding UMKM”, 2025). Setelah *holding* UMKM memiliki legalitas dan tata kelola yang baik maka dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk memenuhi kebutuhan modalnya. Dengan skala ekonomi yang lebih besar, *holding* UMKM akan lebih mudah mendapatkan KUR dibandingkan UMKM individual.

Selain permodalan, kualitas produk UMKM yang beragam juga menjadi tantangan dalam pemasaran. Belum semua produk UMKM memenuhi standar yang ditetapkan industri besar mitranya dan belum semua memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), apalagi standar internasional. Tantangan lainnya, pelaku UMKM juga banyak yang belum memiliki kemampuan manajemen usaha yang baik, pemahaman yang cukup tentang pembukuan, akses perbankan, dan teknologi digital sehingga kurang siap berintegrasi dan

beradaptasi dalam sistem *holding* UMKM. Untuk itu, perlu ada sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan fasilitasi terhadap UMKM. Upaya tersebut perlu melibatkan *stakeholders* terkait seperti Badan Standarisasi Nasional (BSN), Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian, industri besar mitra UMKM, dan pemerintah daerah. Berbagai upaya untuk menghadapi tantangan tersebut perlu dilakukan secara komprehensif agar *holding* UMKM terlaksana dengan baik sehingga tujuan pembentukan *holding* UMKM tercapai.

Penutup

Pemerintah berencana membentuk *holding* UMKM, yaitu konsep pengelompokan UMKM ke dalam satu entitas yang terkoordinasi. Tujuannya mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional, dan memperkuat rantai pasok industri. Manfaatnya menjamin keberlanjutan produksi, ada kepastian pasar, menekan biaya produksi, serta meningkatkan daya saing dan pendapatan UMKM.

Tantangan pembentukan *holding* UMKM antara lain belum ada regulasi, kebutuhan permodalan, dan kualitas produk belum semua memenuhi standar. Pelaku UMKM juga banyak yang belum memiliki kemampuan manajerial, pemahaman tentang pembukuan, akses ke perbankan, dan pemanfaatan teknologi digital. Untuk itu, pemerintah perlu segera membentuk PP *holding* UMKM dan BLU pembiayaan. Sosialisasi, edukasi, pendampingan, dan fasilitasi terhadap UMKM juga perlu dilakukan dengan melibatkan *stakeholders* terkait.

Komisi VII DPR RI perlu mendorong pemerintah segera membentuk PP *holding* UMKM dan BLU pembiayaan, serta melakukan upaya mengatasi tantangan agar rencana pembentukan *holding* UMKM terwujud. Komisi VII DPR RI perlu mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan pembentukan *holding* UMKM dan BLU pembiayaan.

Referensi

- Anggela, N. L. (2025, Juni 3). Menteri Maman bidik 10 sektor masuk dalam Holding UMKM. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20250603/12/1882010/menteri-maman-bidik-10-sektor-masuk-dalam-holding-umkm>.
- Anggraeni, R. (2024, Desember 17). Asosiasi dukung rencana pembentukan Holding UMKM, ini keuntungannya. *Bisnis.com*. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20241217/12/1825082/asosiasi-dukung-rencana-pembentukan-holding-umkm-ini-keuntungannya>.
- Baderi, F. (2025, Januari, 6). Holding UMKM. *Neraca.co.id*. <https://www.newneraca.neraca.co.id/article/212417/holding-umkm>
- Bentuk Holding UMKM, Pemerintah godok regulasi baru. (2024, Desember 19). *Hukumonline.com*. <https://pro.hukumonline.com/legal-intelligence/a/bentuk-holding-umkm-pemerintah-godok-regulasi-baru-lt6762e557c8c37/>.
- Betalia, V. (2025, Juni 21). Apa kabar sembilan Holding UMKM, ini bocoran dari kementerian. *Inilah.com*. <https://www.inilah.com/apa-kabar-sembilan-holding-umkm-ini-bocoran-dari-kementerian>.
- Menteri sebut UMKM Holding beri kesempatan pelaku usaha bertumbuh. (2025, Mei 28). *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4864393/menteri-sebut-umkm-holding-beri-kesempatan-pelaku-usaha-bertumbuh>.
- Pembentukan Holding UMKM untuk dorong ekonomi Indonesia: fokus pada 10 sektor utama. (2025, Januari 4). *Linkumkm.id*. <https://linkumkm.id/news/detail/15562/pembentukan-holding-umkm-untuk-dorong-ekonomi-indonesia-fokus-pada-10-sektor-utama>.
- Pemerintah akan tunjuk usaha kecil dan menengah sebagai operator UMKM Holding. (2025, Juni 14). *Tempo.co*. <https://www.tempo.co/ekonomi/pemerintah-akan-tunjuk-usaha-kecil-dan-menengah-sebagai-operator-umkm-holding-1695741>.
- Simanjuntak, S. D. A. (2024, Desember 14). Para pengusaha dukung pembentukan Holding UMKM, ini penjelasan APINDO. *Bisnis.com*. https://ekonomi.bisnis.com/read/20241214/9/1824286/para-pengusaha-dukung-pembentukan-holding-umkm-ini-penjelasan-apindo?utm_source=chatgpt.com.
- Zhafira, A.N. (2025, Mei 28). Anggota DPR: Holding UMKM solusi untuk naik kelas dan akses KUR. *Antaraneews.com*. <https://www.antaraneews.com/berita/4863473/anggota-dpr-holding-umkm-solusi-untuk-naik-kelas-dan-akses-kur>.